

LAPORAN TRIWULAN



Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring Triwulan merupakan hasil kinerja pelaksanaan program/kegiatan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian secara periodik sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring Trwulan ini merupakan salah satu *tool*/ pengukuran dan evaluasi kinerja atas implementasi kegiatan dalam RKA-K/L eksisting seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini berupa merupakan implementasi dari kegiatan Teknis dan Dukungan Manajemen lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian berupa perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap implementasi pelaksanaan program/kegiatan. Salah satu kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan penyerapan anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan program/kegiatan selanjutnya. Ucapan syukur kepada Allah SWT dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan Triwulan III ini.

Bogor, 30 September 2025

Kepala Balai Besar,



Dr. Zainal Abidin, SP, M.Si

NIP 196905021999031003

BAB I

PENDAHULUAN

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BRMP Pascapanen) merupakan salah satu Unit Kerja dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang memiliki tugas dan fungsi sesuai Permentan 10 tahun 2025 yaitu: melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian, dengan fungsinya, yaitu: a) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; b) pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian; c) pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian; d) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; e) pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian; f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; dan g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2025 BRMP Pascapanen Pertanian mempunyai kegiatan yang mendukung dua program, yaitu:

1. Kegiatan teknis mendukung Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, meliputi Penyidikan dan Pengujian Produk.
2. Kegiatan layanan mendukung Program Dukungan Manajemen fasilitasi perakitan dan modernisasi pertanian, dengan target output 1 Kegiatan, yaitu Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian; 4 layanan, mencakup: 1) Layanan BMN, 2) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, 3) Layanan Umum, dan 4) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor); dan 1 dokumen Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

1.1 Sasaran

BRMP Pascapanen Pertanian memiliki sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja. Pada Triwulan III, Perjanjian Kinerja BRMP Pascapanen yaitu:

1. Meningkatnya kualitas produk pascapanen pertanian, dengan indikator sasaran: 1) Persentase produk pascapanen pertanian yang tersertifikasi; 2) Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian.
2. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator sasaran: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.
3. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator sasaran: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Hal ini berarti instansi pemerintah bertanggung jawab untuk melaporkan capaian kinerja mereka dan menunjukkan bagaimana mereka menggunakan sumber daya publik. Akuntabilitas kinerja diukur berdasarkan capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja.

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja BRMP Pascapanen Pertanian saat ini, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas produk pascapanen pertanian dengan indikator sasaran: Persentase produk pascapanen pertanian yang tersertifikasi dengan target - serta Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian dengan target.
2. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan target nilai 82.

Pada Triwulan III, Nilai Pembangunan Zona Integritas telah tercapai 75% dari total target yang ditetapkan dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya terbitnya SK Tim Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Matrik rencana kerja ZI, sosialisasi pembangunan budaya kerja berakhlak, Laporan Monev ZI bulanan, sosialisasi SPI dan UPG, Nilai IKM Tw 1 – Tw 3, dan pemenuhan eviden pada area lain.

3. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian dengan target nilai 85.

Pada Triwulan III, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 92,95 (109% dari target).

2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM target nilai 82, namun dalam pelaksanaannya saat ini telah tercapai 75% dengan kendala yang sangat terasa adalah blokir anggaran serta kesibukan

SDM yang terbatas. Perlu dikoordinasikan lebih intens antar kelompok/bagian dan Tim ZI untuk pelaksanaan kegiatan ZI dan menyiapkan eviden area 1 – 6.

BAB III

KEGIATAN STRATEGIS

BRMP Pascapanen Pertanian mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab kabupaten pada kegiatan swasembada pangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan tertanggal 7 Maret 2025, di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang meliputi kegiatan olah/cetak sawah rakyat, padi Gogo dan LTT Reguler.

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis

Program Strategis Kementerian Pertanian berupa kegiatan swasembada pangan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam rangka mendukung Sumatera Selatan untuk menjadi lumbung pangan nasional, BRMP Pascapanen Pertanian sebagai penanggung jawab di lokasi Banyuasin, Sumatera Selatan telah melaksanakan panen raya IP 200 di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan panen raya jagung di Kecamatan Tanjung Lago. Kegiatan optimasi lahan tahun 2024 terdapat di tiga desa yaitu : Merah mata, Pematang Palas, dan Pulau Borang. Sedangkan untuk kegiatan optimasi lahan 2025 hanya terdapat di satu desa yaitu desa perajin. Dari kegiatan optimasi lahan 2024 sudah ada kenaikan indeks pertanaman dari IP 100 ke IP 200. Diharapkan hal ini juga dapat diteruskan menjadi IP 300. Selain itu, dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 10 Tahun 2025 yang berfokus pada pengelolaan jagung diharapkan dapat menggenjot serapan jagung nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa kendala dalam pencapaian target program strategis Kementan terkait tantangan dalam distribusi sarana produksi pertanian seperti keterbatasan pelabuhan besar untuk distribusi logistik yang mengakibatkan keterlambatan.

3.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang terjadi di lapang perlu diatasi dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak di lingkungan wilayah tersebut secara intensif. Penyuluh dan Dinas Pertanian setempat perlu bergerak lebih cepat dan tetap berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Kabupaten/Kota. Pemerintah memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) serta benih unggul. Selain itu, permasalahan alat dan mesin pertanian juga perlu perbaikan supaya tidak menghambat mobilisasi untuk perluasan areal tanam. Pemerintah berupaya membangun infrastruktur jalan tol yang akan segera ditindaklanjuti untuk mengurai kemacetan dan transportasi logistik menjadi lebih baik.

BAB IV

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

4.1. Evaluasi Laporan Aplikasi Monev Online

Aplikasi e-Monev merupakan salah satu instrumen atau media pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja-K/L yang tidak saja mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan, namun juga mendukung akuntabilitas intervensi pemerintah, baik Renja-K/L maupun RKP. SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun untuk memudahkan satuan kerja dalam monev pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini menyajikan informasi terkait Nilai Aspek Perencanaan dan Nilai Aspek Pelaksanaan.

Nilai Kinerja SMART BRMP Pascapanen Pertanian pada Triwulan III Tahun 2025, dengan aspek penilaian yaitu:

- a. Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Anggaran masih 0% dengan rincian: a) CRO dengan nilai 0%, b) Penggunaan SBK dengan nilai 0%, dan c) Efisiensi SBK dengan nilai 0%;
- b. Nilai Aspek Kinerja Pelaksanaan Anggaran mencapai 92,95 mencakup: a) Revisi DIPA 100, b) Deviasi Hal 3 DIPA 100, c) Penyerapan Anggaran 99,18, d) Belanja Kontraktual 100, e) Penyelesaian Tagihan 100, f) Pengelolaan UP dan TUP 100, g) Dispensasi SPM 0%, dan Progres Rincian Output 100.

Kendala dalam aplikasi monev online adalah sistem yang terkadang *off* atau sedang dalam perbaikan sehingga laporan monitoring dan evaluasi terkendala. Selain itu pengambilan data dari aplikasi lain yang terhubung seperti SAKTI masing berproses sehingga data belum sinkron. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, sebelum penginputan dan pembukaan aplikasi monev dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu.

4.2. Evaluasi Realisasi Laporan Keuangan

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA- 018.09.2.648669/2025, tanggal 2 Desember 2024 dengan pagu alokasi anggaran awal sebesar Rp15.718.328.000,-. Komposisi anggaran tahun 2025 terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp15.101.572.000,- dan PNPB sebesar Rp 616.756.000,- (*). Sampai akhir September 2025, BRMP Pascapanen telah melakukan revisi DIPA sebanyak 13 (tiga belas) kali, yaitu: 1) Revisi pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA untuk Triwulan III tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025, 2) Revisi efisiensi Belanja

dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2025 sesuai Inpres no.1 tahun 2024 tanggal 20 Februari 2025, 3) Revisi penambahan anggaran kegiatan program strategis Kementerian tanggal 25 Maret 2025, serta revisi kewenangan KPA (revisi POK) berupa pergeseran anggaran dan penyesuaian detail akun. Pada tahun 2025, pagu alokasi anggaran BRMP Pascapanen Pertanian mengalami pemblokiran sebesar Rp976.756.000,00, kecuali Belanja pegawai (001) dan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002), 4) Revisi terkait belanja pegawai (gaji) dan revisi kewenangan KPA (revisi POK) berupa pergeseran anggaran tanggal 17 April 2025, 5). Revisi kewenangan KPA (revisi POK) berupa pergeseran anggaran tanggal 30 April 2025, 6) Revisi kewenangan KPA (revisi POK) berupa pergeseran anggaran, tanggal 5 Mei 2025, 7) Revisi penambahan akun gaji PPPK dan revisi kewenangan KPA (revisi POK) tanggal 20 Mei 2025 8) Revisi pergeseran antar akun kegiatan Program Strategis, Keuangan, Layanan Perkantoran (A dan C) (Revisi KPA) tanggal 18 Juni 2025, dan 9) Revisi ke sembilan tanggal 25 Juni 2025 merupakan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK (Aplikasi SPAN DIPA) tanggal 18 Juni 2025, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp16.753.328.000,- termasuk blokir organisasi sebesar Rp1.367.866.000,- serta blokir efisinesi anggaran sebesar Rp386.362.000,-, sehingga pagu efektifnya sebesar Rp14.999.100.000,-. Revisi ke 11 dan 12 merupakan revisi POK dan pembukaan blokir RO Humas dan RO Monev. Revisi ke 13 pada 29 September 2025 merupakan revisi terkait Rencana Penarikan Dana dengan pagu anggaran 16.500.679.000,00 Anggaran yang bisa digunakan dalam DIPA/POK sebesar Rp16.152.889.000,00. Realisasi hingga akhir bulan September terhadap pagu total tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Keuangan BRMP Pascapanen per 30 September 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s/d 30 September 2025	
		Rp	%
Belanja Pegawai	6.586.572.000	5.470.914.957	82,22
Belanja barang	9.592.000.000	5.623.159.180	57,11
PNBP	616.756.000	-	-
Total	16.500.679.000	11.094.074.137	67,23

4.3. Evaluasi Manajemen SDM

Kegiatan SDM pada BRMP Pascapanen pada Triwulan III telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya pemrosesan mutasi pegawai, peningkatan kapasitas SDM dengan pengusulan keikutsertaan dalam pelatihan dan menyusun sasaran Kinerja Pegawai. Kegiatan SDM berupa rutinitas tidak mengalami banyak kendala dan dapat berjalan sesuai dengan target.

4.4. Evaluasi Pengelolaan BMN

Kegiatan pengelolaan BMN pada Triwulan III telah melaksanakan perawatan terhadap sarana laboratorium. Terlaksananya pelayanan perlengkapan lainnya, meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana/aset, perbaikan sarana pengujian serta pemeliharaan penerangan kantor. Terlaksananya transfer asset Biopellet ke BRMP Yogyakarta.

4.5. Evaluasi Kegiatan Publikasi dan Humas

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BRMP Pascapanen) berpartisipasi dalam kegiatan pemeringkatan KIP lingkup Kementerian Pertanian sejalan dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Regulasi Perberasan Nasional di Tengah Tantangan Pasar: Sinkronisasi Kebijakan, Penguatan Mutu, Peran Produsen, dan Perlindungan Konsumen". Selama bulan September, Petugas PPID telah melayani 6 pengujian laboratorium melalui lewat konter layanan. Informasi yang diminta sebagian besar adalah layanan pengujian. Permohonan informasi teknologi masih ada dan dapat diselesaikan. Semua permohonan diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh petugas.

4.6. Evaluasi Kegiatan Kerjasama

Saat ini kegiatan kerjasama telah bekerjasama dengan stake holder dari dalam dan luar negeri diantaranya beberapa ruang lingkup diantaranya koordinasi pengujian sesuai ruang lingkup LSPro, pemanfaatan laboratorium, uji banding mutu gabah. Mediasi Perpanjangan Lisensi Fit Rice dengan PT. Petrokimia Gresik telah dilakukan dan akan berlaku selama 4 tahun sampai dengan masa berlakunya paten Proses Penurunan Indeks Glikemik Gabah (Beras IGr) pada tahun 2029. Pengurusan pembebasan bea masuk dan cukai untuk hibah barang dari BioTanah Perancis berupa MEDA (*Mobile Eco Dryer for Agriculture*) telah selesai dan telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

4.7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Kegiatan dukungan manajemen selama Triwulan III telah berjalan dengan kendala utama karena adanya blokir anggaran sehingga kegiatan belum berjalan maksimal.

V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Seiring dengan terbitnya Permentan 10 tahun 2025 terkait perubahan kelembagaan dan Permentan 649 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, anggaran di BRMP Pascapanen baru saja dibuka pemblokirannya di awal September 2025. Beberapa hal yang dapat dilaporkan selama Triwulan III adalah:

1. Evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Produk Pascapanen Pertanian dengan indikator persentase produk pascapanen pertanian yang tersertifikasi dengan target 10%, dan indeks kepuasan layanan pengujian pascapanen pertanian dengan target 3,20. Sampai Triwulan III untuk mencapai target tersebut belum bisa dicapai terutama untuk indikator kinerja kegiatan (IKK) 1, sedangkan untuk IKK 2 telah dicapai angka indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 3,51 atau tercapai 111,56% dari target.
2. Evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK 2 yaitu Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan target nilai 82. Sampai Triwulan 3 telah dilakukan penilaian internal di BRMP Pascapanen (*self assessment*) dan tercapai nilai 84,77 sekitar 103,38% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk penyiapan eviden sampai dengan Triwulan 3 baru tercapai sekitar 75%.
3. Evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK 3 yaitu Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian dengan target nilai 85. Pada Triwulan III, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai akhir September tercapai sebesar 92,95 atau tercapai 109,35%.
4. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan strategis diantaranya terkait tantangan dalam distribusi sarana produksi pertanian seperti keterbatasan pelabuhan besar untuk distribusi logistik yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman benih. Kegiatan manajemen saat ini sudah melakukan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan publikasi dan humas, kepegawaian, layanan BMN.

5. Realisasi keuangan DIPA BRMP Pascapanen per 30 September 2025 yaitu Rp 11.094.074.137,00 atau sekitar 67,23% dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 5.470.914.957,00. dan belanja Barang Rp 5.623.159.180,00.